

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami persembahkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 telah dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Laporan ini merupakan Laporan Kinerja tahun kedua atas pelaksanaan Rencana Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021.

Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman kepada stakeholders dan dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap SKPD wajib menyusun laporan Kinerja. Laporan ini akan disampaikan kepada Bupati Pasaman yang selanjutnya akan menjadi bagian dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pasaman Tahun 2017.

Laporan ini merinci capaian tugas pokok dan fungsi semua Bagian yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman dalam melaksanakan visi dan misi Sekretariat Daerah Kab. Pasaman yang diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Kami menyadari, kualitas laporan ini belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Namun kami akan melakukan perbaikan yang terus menerus (continuous improvement) seperti, menyempurnakan sasaran strategis dan indikator kinerja yang berorientasi hasil, peningkatan kompetensi SDM aparatur dan penguatan manajemen kinerja. Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyusunan laporan ini kami sampaikan penghargaan dan terima kasih, semoga Allah SWT mencatatnya sebagai amal kebaikan.

Lubuksikaping, Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH



M. SALEH, SH.MM
NIP 19590126 198602 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pasaman, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten , Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman

Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman

C. Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah

a. Susunan Organisasi

Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman ditetapkan sebagai Tipe B, merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dengan membawahi sebagai berikut :

1. Asisten Pemerintahan, membawahi :
 - a. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, membawahi:
 - 1) Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Fasilitas Pertanian.
 - 2) Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah.
 - 3) Kepala Sub Bagian Kerjasama Daerah dan Urusan Rantau.
 - b. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Nagari, membawahi:
 - 1) Kepala Sub Bagian Pembinaan Administrasi Pemerintahan Nagari.
 - 2) Kepala Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Nagari.
 - 3) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset Pemerintahan Nagari.
 - c. Kepala Bagian Hukum dan HAM, membawahi:
 - 1) Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan.
 - 2) Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - 3) Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
2. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - a. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian, membawahi:
 - 1) Kepala Sub Bagian Dunia Usaha dan Sarana Perekonomian.

- 2) Kepala Sub Bagian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- 3) Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam dan Lingkungan.
- b. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
 - 1) Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa.
 - 2) Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
 - 3) Kepala Sub Bagian Monev dan Administrasi Pembangunan.
- c. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - 1) Kepala Sub Bagian Agama dan Kebudayaan.
 - 2) Kepala Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
 - 3) Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan.
- 3. Asisten Administrasi Umum membawahi :
 - a. Kepala Bagian Umum, membawahi:
 - 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.
 - 2) Kepala Sub Bagian Pelayanan Pimpinan dan Protokoler
 - 3) Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
 - b. Kepala Bagian Organisasi, membawahi:
 - 1) Kepala Sub Bagian Kelembagaan.
 - 2) Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan.
 - 3) Kepala Sub Bagian Aparatur dan Analisis Jabatan
 - c. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi:
 - 1) Kepala Sub Bagian Pemberitaan
 - 2) Kepala Sub Bagian Pelayanan Mass Media
 - 3) Kepala Sub Bagian Analisis Berita dan Dokumentasi.
- 4. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

- 1. Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
- 2. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif
- 3. Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;

- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas fungsinya.

D. Isu Strategis

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu- isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman dalam kurun waktu 2016-2021, adalah sebagai berikut

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint.

E. Landasan Hukum

Laporan Kabupaten Pasaman ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten ;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Tahun 2016 - 2021.

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kabupaten terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman merupakan hasil kesepakatan bersama antara Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Pasaman dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Pasaman sebagai Kabupaten Yang Sejahtera, Agamis dan Berbudaya.

Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 adalah :
"TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK DAN REFORMASI BIROKRASI YANG DIDUKUNG APARATUR PROFESIONAL"

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan koordinasi perumusan kebijakan umum;
2. Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik;
3. Meningkatkan kualitas pemahaman beragama masyarakat; dan
4. Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang baik melalui aparatur yang bersih dan terpercaya.

3. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan :

1. Terwujudnya kualitas penyiapan bahan pertimbangan hukum yang akuntabel;
2. Meningkatnya efektifitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Terwujudnya percepatan reformasi birokrasi Setda Kab. Pasaman;
4. Terwujudnya kualitas pembangunan melalui pengadaan barang dan jasa;
5. Terwujudnya kualitas pembangunan melalui pengadaan barang dan jasa;
6. Terwujudnya kualitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
7. Terbangunnya komunikasi yang efektif dengan publik dan menampung aspirasi masyarakat dalam penyebaran informasi dan publikasi kegiatan pemerintahan;
8. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah; dan
9. Terciptanya daya saing perekonomian antar lapisan masyarakat.

b. Sasaran

1. Terwujudnya Produk Hukum Daerah yang harmonis, efektif dan berkualitas;
2. Terwujudnya pelayanan batuan hukum kepada masyarakat;
3. Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Pemerintahan Kabupaten Pasaman;
4. Meningkatkan kapasitas aparatur dan penyelenggaraan fasilitasi Pemnag;
5. Meningkatnya kualitas administrasi pembangunan;
6. Terwujudnya peningkatan ekonomi masyarakat;
7. Terwujudnya pengelolaan APBD yang baik dan benar;
8. Meningkatnya pemahaman pengamalan ajaran agama dan pembinaan remaja;
9. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemda dan peningkatan kepuasan masyarakat;
10. Meningkatnya akuntabilitas administrasi Setda;
11. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang informasi pembangunan;

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Pada tahun 2017 Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman memperjanjikan target kinerja yang tertera pada tabel di bawah ini :

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2017	BAGIAN
1. Terwujudnya Produk Hukum Daerah yang harmonis, efektif dan berkualitas	1. Jumlah Perda yang disetujui oleh Pemerintah Provinsi	Perda	11	HUKUM
	2. Jumlah Perbup yang disetujui oleh Pemerintah Provinsi	Perbup	15	HUKUM
2. Terwujudnya pelayanan batuan hukum kepada masyarakat	3. Jumlah kasus hukum masyarakat yang bisa diberi bantuan hukum oleh Pemda	Kasus	2	HUKUM
3. Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Pemerintahan Kabupaten Pasaman	4. Jumlah OPD dan Kecamatan yang memiliki capaian kinerja sangat tinggi	SKPD	9	PUM
	5. Nilai LPPD	Skor	3.01	PUM
	6. Jumlah Kecamatan yang menjadi model dalam pelayanan adm. Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kec	4	PUM
4. Meningkatkan kapasitas aparatur dan penyelenggaraan fasilitasi Pemnag	7. Jumlah Nagari yang berprestasi tingkat provinsi	Nagari	3	PEMNAG

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2017	BAGIAN
	8. Jumlah Temuan Inspektorat pada Nagari	%	2.5	PEMNAG
	9. Jumlah peraturan yang ditetapkan per tahun tiap nagari	perturan	2	PEMNAG
5. Meningkatnya kualitas administrasi pembangunan	10. Persentase paket pekerjaan yang berhasil di proses di ULP	%	99	PEMB
	11. Jumlah OPD yang menyampaikan laporan Realisasi Fisik dan Keuangan tepat waktu	SKPD	29	PEMB
6. Terwujudnya peningkatan ekonomi masyarakat	12. Persentase nasabah yang mengalami kredit macet	%	22	EKO
7. Terwujudnya pengelolaan APBD yang baik dan benar	13. Tersedianya standarisasi harga barang dan jasa	keg	1	EKO
8. Meningkatnya pemahaman pengamalan ajaran agama dan pembinaan remaja	14. Peringkat prestasi MTQ tingkat Provinsi	peringkat	8	KESRA
	15. Jumlah Masjid Paripurna	unit	1	KESRA
	16. Jumlah Organisasi Pemuda atau Remaja mesjid yang mendapat Pembinaan	orang	80	KESRA
	17. Jumlah sekolah yang berpresasi	sek	30	KESRA
9. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemda dan peningkatan kepuasan masyarakat	18. Jumlah OPD yang menetapkan Standar Pelayanan	SKPD	7	
	19. Nilai Evaluasi SAKIP Pemda	Kategori	CC	ORG
	20. Nilai SAKIP Setda	Kategori	CC	ORG
	21. Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	ORG
10. Meningkatnya akuntabilitas administrasi Setda	22. Jumlah temuan BPK di lingkup Setda	Temuan	1	UMUM
11. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang info pembangunan	23. Jumlah nagari dan kecamatan yang tercakup informasi pembangunan	Nagari	15	HUMASY

C. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Pasaman telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 188.08/ 09 /SETDA-PAS/2017 sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman

SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB (BAGIAN)
1. Terwujudnya Produk Hukum Daerah yang harmonis, efektif dan berkualitas	1. Persentase Perda yang disetujui oleh Pemerintah Provinsi	Setiap Perda yang ditetapkan harus mendapatkan evaluasi terlebih dahulu dari Gubernur. $\frac{\text{Jumlah perda yang disetujui}}{\text{Jumlah perda yang ditetapkan}} \times 100$	Data Program Pembentukan Perda (Propemperda)	Hukum dan HAM
2. Terwujudnya pelayanan bantuan hukum	2. Jumlah kasus hukum masyarakat yang bisa diberi akn	Jumlah kasus hukum masyarakat miskin yang dibiayai Bantuan Hukum oleh Pemda	Data Perkara Litigasi dan Non litigasi	Hukum dan HAM

SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB (BAGIAN)
kepada masyarakat	bantuan hukum oleh Pemda			
3. Meningkatkan Kapasitas Aparatur dan Pemerintahan Kabupaten Pasaman	3. Nilai LPPD	Hasil Penilaian terhadap LPPD Kabupaten	Hasil Penilaian	Adpum
4. Meningkatkan kapasitas aparatur dan penyelenggaraan fasilitasi Pemnag	4. Persentase Nagari yang berprestasi tingkat provinsi	Jumlah nagari yang berprestasi dapat diukur dari $\frac{\text{Jumlah Prestasi Nagari}}{\text{Jumlah Nagari}} \times 100\%$	Data Prestasi Nagari	Pemerintahan Nagari
5. Meningkatkan pemahaman pengamalan ajaran agama dan pembinaan remaja	5. Peringkat prestasi MTQ tingkat Provinsi	Peringkat yang diraih pada MTQ Tingkat Propinsi	Data Peringkat MTQ	Kesra
a.	6. Jumlah Masjid Paripurna	Penilaian Masjid Yang Paripurna sesuai standar	Hasil Penilaian	Kesra
6. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemda dan peningkatan kepuasan masyarakat	7. Nilai Evaluasi SAKIP Pemda	Hasil Penilaian terhadap SAKIP Kabupaten oleh KemenPANRB	Hasil Penilaian	Organisasi
	8. Nilai SAKIP Setda	Hasil Penilaian terhadap SAKIP Setda oleh Inspektorat Kabupaten	Hasil Penilaian	Organisasi
	9. Indeks Kepuasan Masyarakat	Untuk mengetahui tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Pelayanan secara berkala melalui kuisioner $\text{NRR Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot unsur Pelayanan}}{\text{Jumlah Unsur Pelayanan}}$ $\text{Indeks per unsur} = \frac{\text{Total Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terukur}}$ $\text{Nilai IKM Konversi} = \text{Indeks per unsur} \times 25$	Laporan Hasil Penilaian	Organisasi
	10. Persentase temuan BPK di lingkup Setda	Berkurangnya Temuan BPK terhadap Laporan Keuangan Setda	Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat	Umum
	11. Tersedianya Standarisasi Harga Barang dan Jasa	Penerbitan Buku Standarisasi Harga Barang dan Jasa	Laporan Kegiatan	Perekonomian
	12. Persentase paket pekerjaan yang berhasil diproses di ULP	$\frac{\text{Jumlah paket yang berhasil di piroses}}{\text{Jumlah yang masuk}} \times 100\%$		Pemb
	13. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang informasi pembangunan	Jumlah kegiatan pemerintah yang dipublikasikan berdasarkan jadwal acara) X 100% Jumlah seluruh kegiatan yang harus dipublikasikan	Laporan Kegiatan	Humasy

D. Perjanjian Kinerja 2017

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017. Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2017
1. Terwujudnya Produk Hukum Daerah yang harmonis, efektif dan berkualitas	1. Jumlah Perda yang disetujui oleh Pemerintah Provinsi	Perda	11
	2. Jumlah Perbup yang disetujui oleh Pemerintah Provinsi	Perbup	15
2. Terwujudnya pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat	3. Jumlah kasus hukum masyarakat yang bisa diberi bantuan hukum oleh Pemda	Kasus	2
	3. Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Pemerintahan Kabupaten Pasaman	4. Jumlah OPD dan Kecamatan yang memiliki capaian kinerja sangat tinggi	SKPD
5. Nilai LPPD		Skor	3.01
6. Jumlah Kecamatan yang menjadi model dalam pelayanan adm. Terpadu Kecamatan (PATEN)		Kec	4
4. Meningkatkan kapasitas aparatur dan penyelenggaraan fasilitasi Pemnag	7. Jumlah Nagari yang berprestasi tingkat provinsi	Nagari	3
	8. Jumlah Temuan Inspektorat pada Nagari	%	2.5
	9. Jumlah peraturan yang ditetapkan per tahun tiap nagari	perturan	2
5. Meningkatnya kualitas administrasi pembangunan	10. Persentase paket pekerjaan yang berhasil di proses di ULP	%	99
	11. Jumlah OPD yang menyampaikan laporan Realisasi Fisik dan Keuangan tepat waktu	SKPD	29
	12. Persentase nasabah yang mengalami kredit macet	%	22
6. Terwujudnya peningkatan ekonomi masyarakat	13. Tersedianya standarisasi harga barang dan jasa	keg	1
7. Terwujudnya pengelolaan APBD yang baik dan benar	14. Peringkat prestasi MTQ tingkat Provinsi	peringkat	8
	i. Jumlah Masjid Paripurna	unit	1
	ii. Jumlah Organisasi Pemuda atau Remaja mesjid yang mendapat Pembinaan	orang	80
iii.	17. Jumlah sekolah yang berprestasi	sek	30
8. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemda dan peningkatan kepuasan masyarakat	18. Jumlah OPD yang menetapkan Standar Pelayanan	SKPD	7

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2017
	19. Nilai Evaluasi SAKIP Pemda	Kategori	CC
1.	20. Nilai SAKIP Setda	Kategori	CC
2.	21. Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik
10. Meningkatnya akuntabilitas administrasi Setda	22. Jumlah temuan BPK di lingkup Setda	Temuan	1
11. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang info pembangunan	23. Jumlah nagari dan kecamatan yang tercakup informasi pembangunan	Nagari	15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2017. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Sekretariat Daerah...

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target
> 100%	Melebihi Target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut

Pencapaian Kinerja Sasaran
Sekretariat Kabupaten Pasaman
Tahun 2017

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	> 90
2	Baik	75.00 – 89.99
3	Cukup	65.00 – 74.99
4	Kurang	50.00 – 64.99
5	Sangat Kurang	0 – 49.99

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2017. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2017 hasil reu dan Indikator Kinerja Utama SKPD berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Nomor : 88.08/ 09 /2017, telah ditetapkan dengan 11 (sebelas) sasaran dan 23 indikator kinerja (out comes).

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman tahun 2017 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017

INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	BAGIAN
1. Persentase Perda yang disetujui oleh Pemerintah Provinsi	Perda	11	9	82	Hukum dan HAM
2. Jumlah kasus hukum masyarakat yang bisa diberi bantuan hukum oleh Pemda	Kasus	2	2	100	Hukum dan HAM
3. Nilai LPPD	Skor	3.01	3,10	103	Adpum
4. Persentase Nagari yang berprestasi tingkat provinsi	Nagari	3	1	33	Pemnag
5. Peringkat prestasi MTQ tingkat Provinsi	Peringkat	8	5	160	Kesra
6. Jumlah Masjid Parijurna (PER Kec)	unit	1	1	100	Kesra
7. Nilai Evaluasi SAKIP Pemda	Kategori	CC	CC	100	Organisasi
8. Nilai SAKIP Setda	Kategori	CC	CC	100	Organisasi
9. Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Baik	100	Organisasi
10. Persentase temuan BPK di lingkup Setda	Temuan	1	0,5	100	Umum
11. Tersedianya Standarisasi Harga Barang dan Jasa	Keg	1	1	100	Eko
12. Persentase paket pekerjaan yang berhasil diproses di ULP	%	99	100	100	Pemb.
13. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang informasi pembangunan	Nagari	15	25	165	Humasy
Rata-Rata Capaian IKU				100,3	

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut adalah sebesar 100,3 %

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 sebanyak 11 (sebelas) sasaran.

Tahun 2017 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kab. Pasaman 11 (sebelas) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2017	REALISASI	%CAPAIAN	STATUS	BAGIAN
1. Terwujudnya Produk Hukum Daerah yang harmonis, efektif dan berkualitas	1. Jumlah Perda yang disetujui oleh Pemerintah Provinsi	Perda	11	9	81	IKU	HUKUM
	2. Jumlah Perbup yang disetujui oleh Pemerintah Provinsi	Perbup	15	61	400		HUKUM
2. Terwujudnya pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat	3. Jumlah kasus hukum masyarakat yang bisa diberiakan bantuan hukum oleh Pemda	Kasus	2	2	100	IKU	HUKUM
	4. Jumlah OPD dan Kecamatan yang memiliki capaian kinerja sangat tinggi	SKPD	9	9	100		PUM
3. Meningkatkan Kapasitas Aparatur dan Pemerintahan Kabupaten Pasaman	5. Nilai LPPD	Skor	3.01	3,10	103	IKU	PUM
	6. Jumlah Kecamatan yang menjadi model dalam pelayanan adm. Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kec	4	4	100		PUM
4. Meningkatkan kapasitas aparatur dan penyelenggaraan fasilitasi Pemnag	7. Jumlah Nagari yang berprestasi tingkat provinsi	Nagari	3	1	33	IKU	PEMNAG
	8. Jumlah Temuan Inspektorat pada Nagari (penurunan)	%	2.5	0,72	300		PEMNAG
5. Meningkatkan kualitas administrasi pembangunan	9. Jumlah peraturan yang ditetapkan per tahun tiap nagari	perturan	2	3	150		PEMNAG
	10. Persentase paket pekerjaan yang berhasil di proses di ULP	%	99	100	101	IKU	PEMB

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2017	REALISASI	%CAPAIAN	STATUS	BAGIAN
	11. Jumlah OPD yang menyampaikan laporan Realisasi Fisik dan Keuangan tepat waktu	SKPD	29	20	68		PEMB
6. Terwujudnya peningkatan ekonomi masyarakat	12. Persentase nasabah yang mengalami kredit macet	%	6	5	83		EKO
7. Terwujudnya pengelolaan APBD yang baik dan benar	13. Tersedianya standarisasi harga barang dan jasa	keg	1	1	100	IKU	EKO
8. Meningkatnya pemahaman pengamalan ajaran agama dan pembinaan remaja	14. Peringkat prestasi MTQ tingkat Provinsi	peringkat	8	5	160	IKU	KESRA
	15. Jumlah Masjid Paripurna (Per Kec)	unit	1	1	100	IKU	KESRA
	16. Jumlah Organisasi Pemuda atau Remaja mesjid yang mendapat Pembinaan	orang	80	0	0		KESRA
	17. Jumlah sekolah yang berpresatsi	sek	30	30	100		KESRA
9. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemda dan peningkatan kepuasan masyarakat	18. Jumlah OPD yang menetapkan Standar Pelayanan	SKPD	7	6	90		ORG
	19. Nilai Evaluasi SAKIP Pemda	Kategori	CC	CC	100	IKU	ORG
	20. Nilai SAKIP Setda	Kategori	CC	CC	100	IKU	ORG
	21. Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Baik	100	IKU	ORG
10. Meningkatnya akuntabilitas administrasi Setda	22. Jumlah temuan BPK di lingkup Setda	Temuan	1	0,5	100	IKU	UMUM
11. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang info pembangunan	23. Jumlah nagari dan kecamatan yang tercakup informasi pembangunan	Nagari	15	25	160	IKU	HUMASY

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Sekretaria Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 adalah sebesar 118,6% yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 :

Terwujudnya Produk Hukum Daerah Yang Harmonis, Efektif dan Berkualitas

Target pada Indikator Kinerja Jumlah Perda yang disetujui oleh Pemerintah Propinsi adalah 11 Perda dan terealisasi sebanyak 9 Perda dengan capaian 82 %. Pada dasarnya Tahun 2017 sudah dibahas 11 Perda namun untuk 3 Perda yang belum ditetapkan sedang menunggu evaluasi dari Propinsi, sehingga nantinya dapat ditetapkan pada Bulan Januari 2018, dengan capaian 81 %.

Untuk jumlah Peraturan Bupati yang ditetapkan dengan realisasi lebih dari 100% atau 4 kali lipat dari target karena pada Tahun 2017 ditetapkan Perbup Tentang Pembentukan UPT dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman, pada indikator ini tercapai sebesar 400%

Sasaran 2 :

Terwujudnya pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat

Untuk Indikator Jumlah kasus hukum masyarakat yang bisa diberikan bantuan hukum oleh Pemda Kegiatan pelayanan bantuan hukum secara umum bersifat kondisional yang artinya pelayanan bantuan hukum ini diberikan sesuai dengan kondisi ada atau tidaknya perkara perdata maupun tata usaha Negara yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Pasaman. Pada Tahun 2017 ada 1 (satu) Perkara Tata Usaha Negara tentang gugatan kepada Wali Nagari Aia Manggih terkait Keputusan Wali Nagari Nomor 87 Tahun 2017. Disamping itu ada 2 Perkara Hukum Masyarakat Miskin yang diberikan Dana Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah yaitu Perkara Pidana atas Nama Mirza dan Perkara Perdata atas nama Bukhari, dari indikator ini tercapai 100%

Sasaran 3 :

Meningkatnya Kapasitas Aparatur dan Pemerintahan Kabupaten Pasaman

Pada tahun 2017, target jumlah OPD yang memiliki kinerja Sangat Tinggi adalah 7 OPD, namun pada tahun 2017 pelaksanaan penilaian kinerja OPD tidak dilaksanakan. Dengan alasan : pada tahun 2017 dilaksanakan restrukturisasi OPD berdasarkan Perda Kabupaten Pasaman Tahun 2016, sehingga penilaian kinerja tidak efektif dilaksanakan karena adanya OPD yang dihapuskan dan digabung. Namun pada dasarnya, melalui EKPPD terhadap LPPD tahun 2016, kinerja OPD dalam pelaksanaan aspek administrasi umum, dan pelaksanaan urusan pemerintahan sudah bagus dan menyebabkan kinerja Kabupaten Pasaman secara keseluruhan menjadi Sangat Tinggi, dari indikator ini tercapai 100%.

Nilai LPPD Kabupaten Pasaman semenjak tahun 2011 memiliki tren yang meningkat. Dimana pada tahun 2011 peringkat Kabupaten Pasaman dari rangking 245, meningkat menjadi 67, dan mulai tahun 2013, melejit menjadi peringkat 10 besar nasional selama 3 tahun berturut-turut dengan Skor capaian kinerja untuk nilai LPPD Kabupaten Pasaman (mulai tahun 2012) sudah mencapai skor 3 (Sangat Tinggi). Pada tahun 2017, target capaian kinerja LPPD adalah sebesar 3,01 sudah tercapai pada tahun 2017, karena berdasarkan EKPPD Tahun 2017 terhadap LPPD tahun 2016 nilai Kabupaten Pasaman mencapai skor 3,348, dari indikator ini tercapai 103%

Dalam rangka meningkatkan peranan kecamatan dalam pelayanan publik kepada masyarakat, Kabupaten Pasaman telah menyelenggarakan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di seluruh Kecamatan semenjak Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/312/BUP-

PAS/2017 tentang penetapan kecamatan sebagai penyelenggaraan PATEN. Dalam pelaksanaan PATEN di seluruh kecamatan masih belum optimal baik dari segi sarana prasarana dan sumber daya manusianya. Oleh karena itu pemerintah kabupaten Pasaman selalu menganggarkan kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia Pelaksanaan PATEN di Kecamatan melalui Kegiatan Bimtek paTEN. Kegiatan Bimtek PATEN pada Tahun 2017 dilaksanakan pada tgl 7 s/d 8 Desember 2017 di Hotel DYMENS Bukittinggi dengan peserta 5 orang /kecamatan yang terdiri dari Sekcam, Kasi Pemerintahan dan Trantib, Kasi Kependudukan dan Capil dan 2 Orang Petugas PATEN. Untuk meningkatkan wawasan dan motivasi perangkat kecamatan kegiatan bimtek PATEN juga dirangkaikan dengan kegiatan studi implementasi PATEN ke Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman. Untuk tahun 2017 yang dijadikan percontohan dalam pelaksanaan PATEN adalah 4 kecamatan yaitu kecamatan Lubuk Sikaping, Kecamatan Panti, Kecamatan Simpati dan Kecamatan Bonjol. selama tahun 2017, sehingga yang fokus kita lakukan pembinaan dan monitoring langsung adalah pada 4 kecamatan dimaksud, dari indikator ini tercapai 100%

Sasaran 4 :

Meningkatkan kapasitas aparatur dan penyelenggaraan fasilitasi Pemerintahan Nagari

Indikator Jumlah Nagari yang berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 ditargetkan 3 Nagari yaitu antara lain lomba:

1. Pos Yandu Terintegrasi terbaik diutus Nagari Aia Manggih
2. Nagari berprestasi diutus Nagari Padang Gelugur
3. Pengelolaan Dana Desa terbaik diutus Nagari Padang Mentinggi

Dan yang keluar sebagai pemenang adalah Nagari Aia Manggih sebagai Pemenang 1 (satu) Tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Pemenang 2 (dua) Tingkat Nasional, dari indikator tercapai 33%

Jumlah dana Nagari se Kab. Pasaman selama tahun 2017 adalah sebesar Rp 98.295.947.900,- dan di dapat temuan oleh sebesar Rp 710.550.664, maka terdapat temuan sebesar 1,45% . Dari temuan tersebut telah diselesaikan sebesar Rp 3.011.450,- , sehingga yang menjadi temuan sebesar 0,72%, dari indikator ini tercapai sebesar 300%.

Dari Indikator Jumlah Peraturan Nagari yang Ditetapkan per Nagari Per Tahun masing-masing 32Peraturan Per Tahun Terealisasi 3 Peraturan Pernagari pada tahun 2017 sehingga tingkat pencapaiannya sebesar 150%.

Sasaran 5 :

Meningkatnya kualitas administrasi pembangunan

Indikator Persentase paket pekerjaan yang berhasil di proses di ULP, pada tahun 2017 Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pasaman telah melaksanakan pelelangan paket Pekerjaan sebanyak 111 paket meliputi pengadaan barang 14 paket, jasa konstruksi 89 paket, jasa konsultasi 6 paket dan jasa lainnya 6 paket, dari total 111 paket semuanya berhasil dilelang melalui Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, dari indikator ini terealisasi sebesar 100%.

Indikator Jumlah OPD yang menyampaikan laporan Realisasi Fisik dan Keuangan tepat waktu, pada tahun 2017 laporan realisasi yang disampaikan oleh OPD tidak tepat waktu, walaupun semua OPD telah disurati bahwa laporan tersebut disampaikan paling lama tanggal 5 setiap bulan, dari indikator ini tidak tercapai.

Sasaran 6 :

Terwujudnya peningkatan ekonomi masyarakat

Dari Indikator Jumlah nasabah yang menunggak di Tahun 2017 sebanyak 367 nasabah dengan total tunggakan pokok dan bunga sebanyak Rp. 1.623.941.996,-. pada tahun 2017 dilakukan penagihan terhadap kredit macet tersebut dengan hasil Rp. 75.500.000,- sampai akhir desember 2017 dengan capaian 5 % dari sisa tunggakan pokok dan bunga, dari indikator ini tercapai sebesar 5%.

Dalam melakukan pembinaan dan penagihan sangat sulit sekali menyakinkan nasabah untuk mengangsur atau melunasi dan memiliki banyak alasan diantaranya yaitu usaha yang dikelola tidak berhasil, karena bencana alam sehingga semua usaha perikanan tidak menghasilkan dan ada juga nasabah sudah meninggal ahli waris tidak sanggup membayar serta banyak nasabah yang tidak diketahui keberadaannya. Apalagi sekarang penyelesaian penagihan sudah diserahkan ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Bukittinggi dan bagi nasabah yang ingin mengangsur atau melunasi dikenakan biaya administrasi (biad) 10% dari pinjaman nasabah. Sehingga semakin sedikit nasabah yang mengangsur atau melunasi.

Sasaran 7 :

Terwujudnya pengelolaan APBD yang baik dan benar

Pada sasaran ini idikatornya adalah tersedianya standarisasi harga barang dan jasa

Pada tahun 2017 telah dicetak Buku Standarisasi Harga Barang dan Jasa sebanyak 2 edisi yang meliputi Edisi 1 sebanyak 115 buah buku dan Edisi 2 sebanyak 75 buah buku

Buku Standarisasi Harga Barang dan Jasa ini sangat dibutuhkan oleh OPD dalam pelaksanaan kegiatan APBD dan Anggaran Kabupaten Pasaman, kegiatan ini untuk tahun 2017 telah tercapai sebesar 100%

Sasaran 8:

Meningkatnya Pemahaman Pengamalan Ajaran Agama dan Pembinaan Remaja

Indikator Peringkat Prestasi MTQ Tingkat Propinsi adalah Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-XXXVI tingkat Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan di Kota Pariaman sebagai Tuan Rumah. Dalam pelaksanaan MTQ ke XXXVI ini melombakan 32 cabang dengan jumlah peserta 58 orang Qori/Qori'ah Kabupaten Pasaman yang berhasil meraih Peringkat 5 untuk tingkat Prov. Sumatera Barat tahun 2017. Target 2017 adalah peringkat 8 teralisasi peringkat 5, keberhasilan ini tidak terlepas dari Pondok Al Qur'an yang kita laksanakan secara bertahap, capaian indikator ini adalah sebesar 160%

Indikator Jumlah Masjid Paripurna dilaksanakan Pembinaan Pengelolaan Sarana Ibadah yang dilaksanakan berupa Workshop untuk 120 orang Pengurus Masjid di Kabupaten Pasaman yang berlangsung selama 3 hari, dan Lomba Masjid Paripurna Tingkat Kabupaten Pasaman yang diikuti oleh 12 Masjid yang merupakan utusan dari kecamatan se Kabupaten Pasaman serta Studi Kelayakan Pembangunan Islamic Center. Selain itu pada kegiatan ini juga diberikan insentif untuk Imam dan Petugas masjid Raya Jorong se Kabupaten Pasaman yang masing-masingnya mendapat Rp. 1.000.000,- dengan jumlah penerima keseluruhannya sebanyak 548 Orang. Pencapaian Kegiatan ini 100 % disebabkan karena kegiatan Study Kelayakan Islamic Senter yang direncanakan telah dilaksanakan oleh Bappeda sehingga tidak dilaksanakan lagi oleh Bagian Administrasi Kesra Setda Pasaman.

Indikator Jumlah Organisasi Pemuda atau Remaja, yang mendapat pembinaan ini tidak dapat dilaksanakan karena anggarannya dialihkan untuk studi Kelayakan Pembangunan Islamic Center Kabupaten Pasaman.

Indikator Jumlah Sekolah yang Berprestasi Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kabupaten kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman, dalam rangka untuk mencegah penanggulangan program UKS yang tidak terkoordinir atau berjalan sendiri-sendiri, perlu didorong kembali penerapan " Kebijakan Satu informasi " yaitu semua Program dan kegiatan yang berkaitan dengan " Kesehatan Sekolah" perlu dikoordinasikan dengan Tim Pembina UKS baik Provinsi, Kabupaten atau Kecamatan. Kegiatan Pembinaan ini melibatkan minimal 4 OPD yakni Dinas

Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama dan Departemen Dalam Negeri (Bagian Kesra). Pembinaan dan Penilaian yang dilaksanakan kepada Pemenang Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kecamatan dengan jumlah 30 sekolah berprestasi. Prestasi yang didapat dari Pembinaan yang dilakukan OPD terkait di Kabupaten Pasaman di dapat prestasi Harapan 1 untuk tingkat Taman Kanak-kanak dan Tingkat SMP se Sumatera Barat tahun 2017.

Sasaran 9 :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemda dan peningkatan kepuasan masyarakat

Indikator Jumlah OPD yang menetapkan standar pelayanan, pada tahun 2017 ditargetkan 10 Unit pelayanan sudah mempunyai standar pelayanan, teralisasi pada tahun 2017 sebanyak 9 unit pelayanan terdiri dari :RSUD Lubuksikaping, Dinas Perizinan, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Keuangan Daerah, Dinas Kesehatan, dari indikator ini tercapai 90%.

Target hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Pasaman pada tahun tahun 2017 adalah CC, pada evaluasi tahun 2017 "CC", indikator ini mencapai 100%.

Indikator untuk Nilai Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah tahun 2017 ditargetkan adalah "CC", pada evaluasi tahun 2017 nilai SAKIP Sekretariat Daerah "CC", maka indikator ini mencapai 100%.

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten ditargetkan pada tahun 2017 adalah "Baik" sedangkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2017 adalah Baik yang survei kepuasan masyarakat pada tahun 2017 adalah pada 10 unit kerja pelayanan publik meliputi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, RSUD dan Puskesmas Lubuksikaping, jadi capaian pada indikator ini adalah 100%

Sasaran 10 :

Indikator Meningkatnya akuntabilitas administrasi Setda, Jumlah temuan Setda pada tahun 2017 adalah sebesar 1,5% dari pagu anggaran sedangkan target 2017 sebesar 1,55% jadi capaian untuk tahun 2017 pada indikator ini adalah 101%.

Sasaran 11 :

Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang info pembangunan

Jumlah Nagari dan kecamatan yang tercakup informasi pembangunan

Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman di Tahun 2017 dengan Sasaran Strategis yakni Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Info pembangunan dengan Indikator Kinerja Nagari dan Kecamatan yang tercakup Informasi dengan target 15 ternyata melebihi yang ditargetkan.

Sejumlah 12 Kecamatan telah terjangkau oleh informasi Pembangunan tentang Kabupaten Pasaman. Sementara dari 15 Nagari yang ditargetkan terjangkau informasi Pembangunan Kab Pasaman di tahun 2017, ternyata melebihi yang ditargetkan yakni 25 Nagari dengan capaian 165%. Hal ini merupakan bukti keberhasilan kinerja Bagian Humas 2017. Bagian Humas Sekretariat Daerah telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam rangka ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam upaya penyebarluasan informasi Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ke tengah-tengah masyarakat di seluruh pelosok Nagari Kabupaten Pasaman

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2017 Sekretariat Daerah Kab. Pasaman

INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 5 TH SESUAI RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2016	CAPAIAN TAHUN 2017	KETERANGAN
1. Jumlah Perda yang disetujui oleh Pemerintah Provinsi	Perda	20	6	9	
2. Jumlah Perbup yang disetujui oleh Pemerintah Provinsi	Perbup	30	40	61	
3. Jumlah kasus hukum masyarakat yang bisa diberi bantuan hukum oleh Pemda	Kasus	5	2	2	
4. Jumlah OPD dan Kecamatan yang memiliki capaian kinerja sangat tinggi	SKPD	16	8	9	
5. Nilai LPPD	Skor	3,46	3,20	3,10	
6. Jumlah Kecamatan yang menjadi model dalam pelayanan adm. Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kec	10	3	4	
7. Jumlah Nagari yang berprestasi tingkat provinsi	Nagari	10	1	1	
8. Jumlah Temuan Inspektorat pada Nagari (penurunan)	%	1	0,5	0,72	
9. Jumlah peraturan yang ditetapkan per tahun tiap nagari	perturan	6	2	3	
10. Persentase paket pekerjaan yang berhasil di proses di ULP	%	99	100	100	
11. Jumlah OPD yang menyampaikan laporan Realisasi Fisik dan Keuangan tepat waktu	SKPD	29	0	0	
12. Persentase nasabah yang mengalami kredit macet	%	14	4	5	
13. Tersedianya standarisasi harga barang dan jasa	keg	1	1	1	
14. Peringkat prestasi MTQ tingkat Provinsi	peringkat	1	13	5	
15. Jumlah Masjid Paripurna (Per Kec)	unit	6	0	1	
16. Jumlah Organisasi Pemuda atau Remaja mesjid yang mendapat Pembinaan	orang	160	0	0	
17. Jumlah sekolah yang berprestasi	sek	50	25	30	
18. Jumlah OPD yang menetapkan Standar Pelayanan	SKPD	29	2	10	
19. Nilai Evaluasi SAKIP Pemda	Kategori	BB	C	CC	

INDIKATOR	SATUAN	TARGET KINERJA 5 TH SESUAI RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2016	CAPAIAN TAHUN 2017	KETERANGAN
20. Nilai SAKIP Setda	Kategori	BB	C	CC	
21. Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori	Baik	Baik	Baik	
22. Jumlah temuan BPK di lingkup Setda (penurunan)	Temuan	1	1	1	
23. Jumlah nagari dan kecamatan yang tercakup informasi pembangunan	Nagari	60	10	25	

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017

Pada Tahun 2017 Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman dengan 24 Program dan 72 Kegiatan dengan realisasi anggaran sebagai berikut :

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran
1	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			
1	Pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS)	232.954.000	221.162.550	11.791.450
2	Program Pemanfaatan Ruang			
2	Inventarisasi Data Rupa Bumi dan Penomoran Rumah Penduduk	106.458.000	87.883.957	18.574.043
3	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah			
3	Penyuluhan hukum pertanahan	71.967.000	51.690.750	20.276.250
4	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah			
5	Pengadaan tanah untuk kepentingan umum	0	0	0
4	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah nagari/desa			
6	Pembinaan administrasi keuangan dan perkantoran nagari	139.474.400	105.863.913	33.610.487
7	Penyelenggaraan pemerintahan nagari dan pemerintahan nagari baru	441.123.100	347.625.786	93.497.314
8	Penyelenggaraan pelatihan dalam rangka meningkatkan SDM pemerintahan nagari	392.315.000	208.684.600	183.630.400
9	Penyelenggaraan penilaian kompetensi wali nagari dan sekretaris nagari			
10	Monitoring, evaluasi, verifikasi, dan pelaporan anggaran pendapatan belanja nagari	39.000.000	13.675.200	25.324.800
5	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			
11	Penbitan majalah Pemkab Pasaman	0	0	0
12	Peningkatan pelayanan informasi publik PPID			
6	Program kerjasama informasi dengan mas media			
13	Penyebarluasan informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah pada media elektronik dan media cetak	2.073.482.050	1.975.188.700	98.293.350
14	Peningkatan kelembagaan dan SDM organisasi kewartawanan	151.500.000	130.422.400	21.077.600
7	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			
15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	41.253.800	39.344.000	1.909.800
8	Program peningkatan peran serta kepemudaan			
16	Pembinaan pengembangan potensi kepemudaan dan organisasi pemuda			
9	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
17	Administrasi Perkantoran	4.260.513.000	3.669.569.686	590.943.314
18	Pemeliharaan Srana dan Prasarana Perkantoran	1.713.188.100	1.480.618.046	232.570.054

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
	19	Rapat dan Koordinasi	2.149.860.000	2.149.194.393	665.607
	20	Pembinaan Unit Kerja Pelayanan Umum	86.188.500	65.318.100	20.870.400
10		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
	21	Pengadaan Peralatan dan Mesin	2.841.464.000	2.655.320.950	186.143.050
	22	Pembangunan Gedung Kantor			
11		Program peningkatan disiplin aparatur			
	23	Pengadaan pakaian Aparatur	120.600.000	88.350.000	32.250.000
	24	Pengadaan Pakaian KDH/WKDH	128.350.000	124.830.000	3.520.000
12		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
	25	Penyusunan Laporan SKPD	6.000.000	6.000.000	0
13		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			
	26	Rapat koordinasi dan kunjungan kerja pejabat pemerintahan daerah	171.544.800	156.993.239	14.551.561
	27	Dialog dan koordinasi organisasi sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat	63.290.000	63.184.602	105.398
	28	Penyusunan buku LPPD	100.597.200	94.428.139	6.169.061
	29	Bimbingan teknis dan penilaian kompetensi aparatur kecamatan	79.994.500	71.407.400	8.587.100
	30	Evaluasi kerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD)	131.138.900	124.365.424	6.773.476
14		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah			
	31	Kerjasama antar daerah, pembangunan dan masyarakat perantau berbasis nagari	59.527.400	53.334.550	6.192.850
	32	Monitoring dan Evaluasi Penegasan Tapal batas Administrasi Pemerintahan	72.420.000	58.589.500	13.830.500
15		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan			
	33	Pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum	86.833.000	75.489.450	11.343.550
	34	Bintek penyusunan produk hukum nagari	86.000.000	65.016.500	20.983.500
	35	Penyusunan rancangan produk hukum daerah	193.463.500	166.598.680	26.864.820
	36	Penguatan SKPD pengelolaan ranham	26.400.000	23.550.000	2.850.000
	37	Bintek penyusunan produk hukum daerah	53.278.000	48.813.000	4.465.000
	38	Pelayanan bantuan hukum	67.735.000	49.482.500	18.252.500
	39	Pelayanan komunikasi masyarakat dan pos pelayanan hukum terpadu	69.681.500	67.124.650	2.556.850
	40	Pembinaan keluarga dan nagari sadar hukum	47.046.300	40.852.500	6.193.800
	41	Pengkajian dan telaahan akademis rancangan produk hukum daerah	54.155.000	41.422.500	12.732.500
	42	Penyuluhan hukum	204.614.000	190.322.200	14.291.800
16		Program Penataan Daerah Otonomi Baru			
	43	Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	110.860.000	99.143.900	11.716.100
17		Program peningkatan keimanan dan ketaqwaan			
	44	Penyelenggaraan pondok al-quran dalam rangka peningkatan kualitas dan produktifitas qari/qariah	889.224.000	823.085.550	66.138.450
	45	Penunjang kegiatan tim ramadhan dan keagamaan kepala daerah	531.673.000	522.302.400	9.370.600
	46	Pelatihan pendidikan keagamaan	198.460.000	197.972.400	487.600
	47	pengembangan dan fasilitasi didikan subuh/TPQ/TPS/MDA	1.942.323.200	1.858.959.600	83.363.600
	48	Penyelenggaraan MTQ tingkat Kabupaten Pasaman	985.197.300	881.472.350	103.724.950
	49	Pelaksanaan dan persiapan kafilah MTQ tingkat propinsi sumatera barat	1.018.425.000	902.780.000	115.645.000
	50	Pemberdayaan ulama dalam rangka pemberantasan PEKAT	0	0	0
	51	Penyelenggaraan pondok tahfiz Al-Quran	188.327.000	179.553.150	8.773.850

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	
	52	Pembinaan pengelolaan sarana ibadah	858.415.500	658.548.050	199.867.450
18		Program koordinasi pengendalian pembangunan			
	53	Administrasi pembangunan	136.281.200	108.320.250	27.960.950
	54	Monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaporan pelaksanaan pembangunan	124.288.000	79.248.500	45.039.500
19		Program optimalisasi pelaksanaan pemerintah daerah			
	55	Pembinaan kelembagaan daerah dan movev tupoksi	79.293.500	70.915.550	8.377.950
	56	penyelenggaraan upacara dan acara keprotokolan	280.045.000	245.396.356	34.648.644
	57	Evaluasi dan pelaporan penerapan SPM dan SOP	117.200.000	79.724.800	37.475.200
	58	Bintek penyelenggaraan kehumasan dan keprotolan	51.312.000	46.417.000	4.895.000
	59	Review standar kompetensi jabatan manajerial	72.209.500	63.256.400	8.953.100
	60	Monitoring dan evaluasi susunan organisasi, perincian tupoksi dan tata kerja perangkat daerah	63.532.500	58.741.350	4.791.150
	61	Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja	91.853.300	86.175.700	5.677.600
20		Program optimalisasi pelaksanaan pembangunan			
	62	Peningkatan sistem manajemen pengadaan barang/jasa pemerintah	253.848.700	228.625.139	25.223.561
	63	Pembinaan unit pelayanan umum pengadaan barang/jasa pemerintah	368.850.200	332.257.750	36.592.450
21		Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama			
	64	Penyelenggaraan pemberangkatan dan pemulangan haji di Pasaman	206.671.000	198.739.000	7.932.000
	65	Pelaksanaan peringatan hari besar islam di lingkungan pemerintah kabupaten pasaman	15.770.000	14.942.500	827.500
22		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			
	66	Pengendalian gratifikasi di lingkungan pemerintah daerah	21.900.000	20.500.000	1.400.000
		Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan			
	67	Pengendalian sistem dan prosedur pengawasan bidang sumber daya alam, penata lingkungan hidup dan agrobisnis	48.438.100	41.493.500	6.944.600
	68	Monitoring Sarana dan Prasarana Serta Perkembangan Perekonomian Daerah	142.739.700	126.986.900	15.752.800
23		Program perencanaan pembangunan daerah			
	69	Pembinaan dan penyusunan LAKIP, RKT dan penetapan kinerja	128.285.000	95.667.417	32.617.583
	70	Penyusunan Renstra SKPD	5.000.000	4.745.000	255.000
	71	Road map reformasi birokrasi	69.137.500	63.086.200	6.051.300
24		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
	72	Penyusunan analisa standar satuan harga	96.773.000	90.710.050	6.062.950
		Jumlah	25.659.743.250,00	22.991.484.627,00	2.668.258.623,00

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Selama Tahun 2017 Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman mempunyai 11 (sebelas) sasaran, untuk mencapai 11 sasaran Sekretariat Daerah dapat dilihat dari 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja sasaran, 24 (dua puluh tiga) Program dan 72 (tujuh puluh dua) kegiatan dengan capaian kinerja rata-rata terealisasi 118 %.

Rata-rata capaian kinerja dan realisasi keuangan untuk masing-masing sasaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman adalah sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR	%CAPAIAN	STATUS	KATEGORI	BAGIAN
1. Terwujudnya Produk Hukum Daerah yang harmonis, efektif dan berkualitas	1. Jumlah Perda yang disetujui oleh Pemerintah Provinsi	81	IKU	Baik	HUKUM
	2. Jumlah Perbup yang disetujui oleh Pemerintah Provinsi	400		Sangat Baik	HUKUM
2. Terwujudnya pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat	3. Jumlah kasus hukum masyarakat yang bisa diberi bantuan hukum oleh Pemda	100	IKU	Sangat Baik	HUKUM
3. Meningkatkan Kapasitas Aparatur dan Pemerintahan Kabupaten Pasaman	4. Jumlah OPD dan Kecamatan yang memiliki capaian kinerja sangat tinggi	100		Sangat Baik	PUM
	5. Nilai LPPD	103	IKU	Sangat Baik	PUM
	6. Jumlah Kecamatan yang menjadi model dalam pelayanan adm. Terpadu Kecamatan (PATEN)	100		Sangat Baik	PUM
4. Meningkatkan kapasitas aparatur dan penyelenggaraan fasilitas Pemnag	7. Jumlah Nagari yang berprestasi tingkat provinsi	33	IKU	Sangat Kurang	PEMNAG
	8. Jumlah Temuan Inspektorat pada Nagari (penurunan)	300		Sangat Baik	PEMNAG
	9. Jumlah peraturan yang ditetapkan per tahun tiap nagari	150		Sangat Baik	PEMNAG
5. Meningkatkan kualitas administrasi pembangunan	10. Persentase paket pekerjaan yang berhasil di proses di ULP	101	IKU	Sangat Baik	PEMB
	11. Jumlah OPD yang menyampaikan laporan Realisasi Fisik dan Keuangan tepat waktu	68		Cukup	PEMB
6. Terwujudnya peningkatan ekonomi masyarakat	12. Persentase nasabah yang mengalami kredit macet	83		Baik	EKO
7. Terwujudnya pengelolaan APBD yang baik dan benar	13. Tersedianya standarisasi harga barang dan jasa	100	IKU	Sangat Baik	EKO
8. Meningkatkan pemahaman pengamalan ajaran agama dan pembinaan remaja	14. Peringkat prestasi MTQ tingkat Provinsi	160	IKU	Sangat Baik	KESRA
	15. Jumlah Masjid Paripurna (Per Kec)	100	IKU	Sangat	KESRA

SASARAN	INDIKATOR	%CAPAIAN	STATUS	KATEGORI	BAGIAN
				Baik	
	16. Jumlah Organisasi Pemuda atau Remaja mesjid yang mendapat Pembinaan	0		Tidak diukur	KESRA
	17. Jumlah sekolah yang berpresasi	100		Sangat Baik	KESRA
9. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemda dan peningkatan kepuasan masyarakat	18. Jumlah OPD yang menetapkan Standar Pelayanan	90		Sangat Baik	ORG
	19. Nilai Evaluasi SAKIP Pemda	100	IKU	Sangat Baik	ORG
	20. Nilai SAKIP Setda	100	IKU	Sangat Baik	ORG
	21. Indeks Kepuasan Masyarakat	100	IKU	Sangat Baik	ORG
10. Meningkatnya akuntabilitas administrasi Setda	22. Jumlah temuan BPK di lingkup Setda	100	IKU	Sangat Baik	UMUM
11. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang info pembangunan	23. Jumlah nagari dan kecamatan yang tercakup informasi pembangunan	160	IKU	Sangat Baik	HUMASY
Rata-rata Capaian		118%			

A. HAMBATAN

Dalam penyelenggaraan kegiatan yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman selama Tahun Anggaran 2017 ditemukan beberapa hambatan dan kendala sebagai berikut :
Penyerahan Usulan RKA-SKPD yang sering terlambat ;

1. Penyampaian SPJ yang tidak tepat waktu
2. Sering terlambatnya Satuan Unit Kerja mengirimkan laporan kegiatan setiap bulannya ke Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman karena laporan ini akan direkap dan dijadikan bahan untuk Rapat Evaluasi Kegiatan.

C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Dari kendala dan hambatan yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan – kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman, maka untuk perbaikan dimasa yang akan datang disarankan beberapa upaya yang ditempuh untuk pemecahan masalah yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia.
2. Setiap SKPD seharusnya tepat waktu dalam hal penyampaian Usulan RKA-SKPD, DPA-SKPD dan SPJ, dan laporan kegiatan setiap bulannya.

